

## PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP PERILAKU PENGHINDARAN PAJAK: SEBELUM DAN SELAMA PERIODE PANDEMI COVID-19

Natasha<sup>1</sup>, Yie Ke Feliana<sup>2\*</sup>

<sup>1,2</sup> Jurusan Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Surabaya, Surabaya, Indonesia  
[yiekefeliana@staff.ubaya.ac.id](mailto:yiekefeliana@staff.ubaya.ac.id) \*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang diprosikan dengan ETR. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 472 tahun perusahaan sektor industri non-keuangan pada BEI tahun 2019-2020 yang merupakan hasil dari *metode non-probability sampling* yaitu *purposive judgement sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa independensi dewan komisaris, kepemilikan pemerintah dan ukuran komite audit masing-masing memiliki pengaruh signifikan negatif secara parsial terhadap *tax avoidance*, sedangkan struktur kepemilikan institusional dan variabel kontrol berupa karakteristik perusahaan dengan proksi ukuran perusahaan dan profitabilitas masing-masing memiliki pengaruh signifikan positif secara parsial terhadap aktivitas penghindaran pajak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan uji beda dua sampel yang hasilnya menunjukkan bahwa selama pandemi Covid-19, perusahaan non-keuangan melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 yang tampak dengan nilai ETR tahun 2020 yang lebih rendah.

**Kata Kunci:** masa pandemi covid19; penghindaran pajak; tata kelola

### ABSTRACT

*This study aims to examine the effect of corporate governance on corporate tax avoidance activities in Indonesia companies. The samples in this study were 472 firm years in the non-financial sector on the IDX for period 2019-2020 which were the result of the non-probability sampling method using purposive judgment sampling. Multiple linear regression analysis technique was utilized for hypothesis testing. The results of this study indicate that board independence, government ownership and audit committee each have a partially significant negative effect on corporate tax avoidance, while institutional ownership and control*

variables of this study which is company characteristics as proxied by company size and profitability each have a partially significant positive effect on corporate tax avoidance activities. In addition, this study also used independent sample t-test which the results indicate that during the Covid-19 pandemic, there is an increase in tax avoidance practices from non-financial companies compared to the normal conditions before Covid-19 pandemic due to the lower ETR value in 2020.

**Keywords:** corporate governance; pandemic covid-19 period; tax avoidance

---

#### Histori artikel:

Diunggah: dd-mm-yyyy

Direview: dd-mm-yyyy

Diterima: dd-mm-yyyy

Dipublikasikan: dd-mm-yyyy




---

\* Penulis korespondensi ✉ [yiekefeliana@staff.ubaya.ac.id](mailto:yiekefeliana@staff.ubaya.ac.id)

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi suatu negara yang penerimaannya memiliki dampak positif terhadap investasi serta berperan penting dalam pembiayaan pembangunan sosial dan ekonomi negara tersebut. Di bawah kepatuhan pajak, wajib pajak termasuk perusahaan diwajibkan untuk menyatakan semua pendapatan mereka sebagai kontribusi dalam perkembangan ekonomi negara (Omesi & Appah, 2021). Namun, perusahaan memandang pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba sehingga cenderung memiliki keinginan untuk meminimalkan beban pajak dengan menggunakan celah dari berbagai ketentuan perpajakan yang disebut sebagai aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan temuan dari *Tax Justice Network*, Indonesia menempati posisi keempat se-Asia dalam kasus penghindaran pajak tertinggi dan diestimasikan mengalami kerugian sebesar US\$4,86 miliar per tahun atau setara Rp.71,3 triliun.

Perilaku penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan menimbulkan pandangan yang berbeda bergantung dari kepentingan masing-masing pihak terkait. Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar. Namun, tindakan ini dipandang kurang baik oleh pemerintah. Selain itu, dalam hubungannya dengan teori agensi yang menjelaskan hubungan antara *principal* sebagai pemilik dari perusahaan dengan *agent* sebagai manajer (Jensen & Meckling, 1976), terdapat timbulnya permasalahan agensi terhadap penghindaran pajak yang dapat memberikan peluang bagi manajer untuk bersikap oportunistik dengan melakukan penghindaran pajak untuk tujuan keuntungan pribadi jangka pendek tanpa melihat kepentingan investor sehingga mengakibatkan terjadinya asimetri informasi (Minnick & Noga, 2010). Terjadinya masalah

agensi akibat perbedaan perspektif ini mendorong munculnya peran tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat mengendalikan hubungan kompleks antar pemangku kepentingan.

Beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait dengan hubungan antara tata kelola dengan perilaku penghindaran pajak menunjukkan hasil yang inkonsisten. Ogbeide dan Obaretin (2018) menemukan hubungan positif antara tata kelola perusahaan dan penghindaran pajak. Sebaliknya, penelitian Khurana dan Moser (2012) di negara berkembang menyatakan hubungan negatif antara *corporate governance* dengan penghindaran pajak. Penelitian Chytis *et al.* (2019) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara tata kelola dengan penghindaran pajak. Di sisi lain, penelitian mengenai tata kelola dan penghindaran pajak di negara maju oleh Zeng (2011) menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara keduanya. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau ulang hubungan antara tata kelola dan penghindaran pajak pada perusahaan di Indonesia. Indonesia sebagai obyek penelitian memiliki tiga keunikan utama. Pertama, tata kelolanya menggunakan sistem dua lapis (*two tiers*) dengan adanya pemisahan dewan komisaris dan dewan direksi. Kedua, perpajakan di Indonesia menggunakan sistem *self-assessment*. Ketiga, Indonesia termasuk negara berkembang yang tingkat kesadaran pajaknya relatif rendah dibandingkan dengan negara maju.

Penelitian ini akan menyelidiki pengaruh dari atribut tata kelola perusahaan yang meliputi independensi dewan komisaris, struktur kepemilikan perusahaan oleh lembaga institusional, struktur kepemilikan perusahaan oleh pemerintah, dan ukuran komite audit terhadap perilaku *tax avoidance* pada perusahaan lewat bukti-bukti yang empiris. Kondisi pandemi Covid-19 menyebabkan banyak perusahaan mengalami penurunan laba sehingga terdapat kemungkinan pengaruhnya terhadap peningkatan perilaku penghindaran pajak perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan berfokus dalam melihat apakah terjadi perubahan perilaku *tax avoidance* pada kondisi periode yang berbeda antara kondisi normal sebelum pandemi Covid-19 dengan kondisi saat terjadinya pandemi Covid-19. Sebagai penelitian yang termasuk dalam *basic research*, penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan hasil dari studi yang telah ada sebelumnya dan diharapkan dapat bermanfaat untuk memperluas pengetahuan saat ini.

## TINJAUAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Keberadaan dewan komisaris berfungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan dan mengarahkan kegiatan operasional perusahaan agar dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dewan komisaris yang independen akan makin mengoptimalkan fungsi tersebut dengan terlepasnya dari ikatan kepentingan di perusahaan. Semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin besar perannya dalam memantau perencanaan pajak sehingga upaya penghindaran pajak dapat menghindari sanksi perpajakan dan dapat mengoptimalkan kinerja keuangan perusahaan (Zemzem & Ftouhi, 2013). Penelitian Minnick dan Noga (2010) melaporkan bahwa hubungan antara komisaris independen dan penghindaran pajak memiliki hubungan negatif karena independensi dewan komisaris akan meningkatkan transparansi informasi perusahaan sehingga berpengaruh terhadap penurunan aktivitas penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub> : Independensi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.**

Peran dari pemangku kepentingan sangat berpengaruh penting terhadap pengambilan keputusan perusahaan terutama terkait dengan kebijakan pajak. Dominasi dari pemegang saham pada perusahaan menentukan struktur kepemilikan perusahaan. Penelitian Wulandari dan Sudarma (2022) menunjukkan bahwa tidak semua jenis struktur kepemilikan mempengaruhi penghindaran pajak, hanya kepemilikan institusional dan pemerintah yang berpengaruh signifikan. Pemegang saham institusional dengan kepemilikan yang besar mampu mengintervensi perilaku penghindaran pajak perusahaan dibandingkan dengan pemegang saham minoritas (Shleifer & Vishny 1997). Investor institusional bertindak dalam dua arah yaitu mereka berpotensi untuk meningkatkan penghindaran pajak, tetapi juga membatasinya pada tingkat di mana risiko yang dihasilkan lebih besar daripada manfaat (Kovermann & Velte, 2019). Berdasarkan penelitian Khurana dan Moser (2012); Omesi dan Appah (2021), kepemilikan institusional yang besar dalam jangka panjang memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak karena mereka cenderung membatasi perilaku tersebut untuk mencegah risiko yang lebih tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub> : Struktur kepemilikan perusahaan oleh lembaga institusional berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.**

Di sisi lain, perusahaan milik pemerintah cenderung untuk mengejar tujuan sosial dan politik daripada kebijakan memaksimalkan keuntungan (Shleifer & Vishny, 1997). Manajer perusahaan milik pemerintah akan menjauhkan diri dari penghindaran pajak karena tindakan tersebut menurunkan pengumpulan pendapatan pajak nasional dan mencegah distribusi sosial yang lebih luas dari pendapatan perusahaan. Zeng (2011) menemukan bahwa perusahaan milik pemerintah melakukan penghindaran pajak lebih sedikit daripada perusahaan milik non-pemerintah. Hasil ini sejalan dengan gagasan bahwa perusahaan dengan kepemilikan pemerintah adalah pembayar pajak dan pada saat yang sama merupakan pemungut pendapatan pajak, sehingga memiliki motivasi tambahan untuk kepatuhan pajak dengan meminimalisir praktik penghindaran pajak dalam memaksimalkan pemungutan pajak untuk tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat (Wang, 2011). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub> : Struktur kepemilikan perusahaan oleh pemerintah berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.**

Dewan komisaris membentuk komite audit dengan tujuan sebagai pengawas dalam proses penyusunan laporan keuangan untuk menghindari kecurangan dari manajemen dan berperan dalam pengawasan internal perusahaan. Keefektifan dari fungsi pengawasan komite audit bergantung pada jumlah komite audit yang dimiliki pada perusahaan. Peningkatan jumlah komite audit di perusahaan menyebabkan aktivitas perusahaan akan lebih terkontrol sehingga memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak (Omesi & Appah, 2021). Berdasarkan dari penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013), ukuran komite audit dan penghindaran pajak memiliki hubungan negatif. Jika komite audit meningkat, maka penghindaran pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* akan berkurang. Hal ini karena semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan maka pengendalian kebijakan keuangan akan semakin ketat sehingga akan mengurangi kecenderungan manajemen untuk

melakukan perilaku penghindaran pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>4</sub> : Ukuran Komite audit berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan.**

## METODE PENELITIAN

Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor industri non-keuangan pada BEI tahun 2019-2020 yang merupakan hasil dari metode *non-probability sampling* yaitu *purposive judgement sampling* dengan metode pengumpulan data menggunakan *secondary data collection* atau studi dokumentasi pada *annual report* yang diterbitkan perusahaan *go-public* melalui akses *website* BEI pada [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian *explanatory research* dan menggunakan pendekatan metode kuantitatif yang dilandaskan pada filsafat positivisme dengan teknik analisis regresi linier berganda untuk pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan dengan tingkat intervensi minimal dari peneliti atau peneliti hanya berperan sebagai *observer* dan termasuk dalam *non-contrived settings* berupa *field study* karena dalam menguji hubungan antar variabel, peneliti tidak melakukan perubahan pada desain dan lingkungan asal dari objek yang diteliti. *Time horizon* dari penelitian ini menggunakan *one shot model-cross sectional* yang dilakukan dalam sekali pengumpulan data dengan kriteria pengambilan sampel sebagai berikut :

**Tabel 1. Kriteria Seleksi Karakteristik Sampel Penelitian**

Kriteria Pengambilan Perusahaan Sampel	Jumlah
Jumlah populasi perusahaan pada semua sektor industri yang terdaftar di BEI	1620
Jumlah perusahaan sektor industri keuangan yang terdaftar di BEI	-210
Perusahaan industri non-keuangan yang belum <i>go-public</i> pada tahun 2019-2020	-176
Perusahaan industri non-keuangan yang tidak menerbitkan laporan keuangan ( <i>financial report</i> ) dan laporan tahunan ( <i>annual report</i> ) pada tahun 2019-2020	-68
Perusahaan industri non-keuangan yang tidak menggunakan satuan mata uang rupiah (IDR) selama tahun 2019-2020	-180
Perusahaan industri non-keuangan dengan informasi data laporan keuangan dan laporan tahunan yang tidak lengkap untuk kebutuhan variabel penelitian	-18
Perusahaan industri non-keuangan yang mengalami kerugian (ETR negatif) selama tahun penelitian 2019-2020	-464
<b>Total Sampel</b>	<b>504</b>

Sumber : Data hasil olahan penulis, 2022

Berdasarkan hasil jumlah sampel pada tabel 1 dilakukan pengujian untuk melihat normalitas data dan ditemukan bahwa terdapat beberapa sampel yang merupakan data



*outliers* sehingga perlu dilakukan pembuangan atau penghapusan pada data-data tersebut. Total eliminasi perusahaan sampel yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebanyak 32 data atau sebesar 6,35% dari total sampel awal sehingga jumlah sampel penelitian yang akan digunakan berkurang dari 504 data menjadi sebanyak 472 data.

Jenis investigasi dari penelitian ini termasuk dalam *causal study* karena hubungan dari variabel-variabel penelitian ini bersifat satu arah untuk menyelidiki hubungan sebab-akibat antar variabel independen (tata kelola perusahaan) dengan variabel dependen (praktik penghindaran pajak perusahaan). Rumus variabel dependen, variabel independen dan variabel kontrol penelitian ini adalah sebagai berikut :

- Perilaku penghindaran pajak perusahaan sebagai variabel dependen diukur menggunakan perhitungan *effective tax rate* (ETR) berdasarkan dari penelitian Hanlon dan Heintzman (2010) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$ETR = \frac{\text{total income tax expense}}{\text{total pre - tax income}}$$

- Independensi dewan komisaris sebagai proksi tata kelola perusahaan (variabel bebas) diukur menggunakan perhitungan berdasarkan dari penelitian Chytis *et al.* (2019) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$BoardIndep = \frac{\text{total komisaris independen}}{\text{total anggota dewan komisaris}} \times 100\%$$

- Kepemilikan institusional sebagai proksi tata kelola perusahaan (variabel independen) diukur menggunakan perhitungan yang dirumuskan sebagai berikut :

$$InstOwn = \frac{\text{nilai saham lembaga institusional sebagai shareholder perusahaan}}{\text{total saham beredar perusahaan}} \times 100\%$$

- Kepemilikan pemerintah sebagai proksi tata kelola perusahaan (variabel independen) diukur menggunakan perhitungan yang dirumuskan sebagai berikut :

$$GovOwn = \frac{\text{nilai saham pemerintah sebagai shareholder perusahaan}}{\text{total saham beredar perusahaan}} \times 100\%$$

- Ukuran komite audit sebagai proksi tata kelola perusahaan (variabel independen) diukur menggunakan perhitungan berdasarkan dari penelitian Omesi dan Appah (2021) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$AudCom = \Sigma \text{ Anggota Komite Audit}$$

- Ukuran perusahaan sebagai proksi karakteristik perusahaan (variabel kontrol) diukur menggunakan perhitungan berdasarkan dari penelitian Zemzem dan Ftouhi (2013) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$CompSize = \ln(\text{total asset})$$

- Profitabilitas perusahaan sebagai proksi karakteristik perusahaan (variabel kontrol) diukur menggunakan perhitungan berdasarkan dari penelitian Khurana dan Moser (2012) yang dirumuskan sebagai berikut :

$$Profitability = \frac{\text{total pre - tax income}}{\text{total assets}}$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik deskriptif berfungsi sebagai *summary* dari data penelitian dan memberikan informasi terkait dengan setiap variabel pada penelitian seperti pada tabel berikut ini :

**Tabel 2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
TAX AVOID (ETR)	472	0.0003101	0.9983397	0.24659409	0.15496572
BOARD INDEP	472	0.30000	0.8333333	0.41839395	0.100318447
INST OWN	472	0.00000	0.9600000	0.35768796	0.329624098
GOV OWN	472	0.00000	0.9830676	0.06015784	0.194286031
AUD COM	472	3.00000	7.0000000	3.09957627	0.386392525
COMP SIZE	472	23.989067	33.494533	28.5724392	1.800599112
PROFITABILITY	472	0.000717	0.561491	0.076780	0.077897416
Valid N (listwise)	472				

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk mengestimasi berdasarkan nilai variabel bebas yang diketahui terhadap rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat yang hasilnya adalah berupa koefisien untuk masing-masing variabel independen dalam suatu persamaan linier (Ghozali, 2018). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh model atau persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

$$Y = 0,434 + 0,137 \text{ BoardIndep} - 0,060 \text{ InstOwn} + 0,082 \text{ GovOwn} + 0,044 \text{ AudCom} - 0,012 \text{ CompSize} - 0,236 \text{ Profitability} + \varepsilon$$

**Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.296 <sup>a</sup>	0.088	0.076	0.1489826999

a. Predictors: (Cons), PROF., AUD COM, BOARD INDEP, INST OWN, COMP SIZE, GOV OWN

Berdasarkan hasil perhitungan nilai *adjusted* R<sup>2</sup> di tabel 3, dapat dilihat bahwa variasi variabel terikat pada penelitian ini yaitu Tax Avoidance (ETR) dapat dijelaskan oleh variabel bebas BoardIndep, InstOwn, GovOwn, AudCom, serta variabel kontrol CompSize dan Profitability sebesar 7,6%. Sementara, sebesar 92,4% sisanya menjelaskan variasi Tax Avoidance (ETR) sebagai variabel terikat dengan faktor lainnya di luar model regresi yang diteliti dalam penelitian ini.

**Tabel 4. Hasil Uji Signifikansi Simultan**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.990	6	0.165	7.432	.000 <sup>b</sup>
	Residual	10.321	465	0.022		
	Total	11.311	471			

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE (ETR)

b. Predictors: (Cons), PROF., AUD COM, BOARD INDEP, INST OWN, COMP SIZE, GOV OWN

Hasil output uji statistik F pada tabel 4 menunjukkan bahwa terdapat nilai signifikansi sebesar 0,000 atau sebesar 0%, di mana nilai ini berada di bawah batas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas serta variabel kontrol pada penelitian ini secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap ETR sebagai proksi dari perilaku penghindaran pajak yang merupakan variabel terikat dalam penelitian ini.

**Tabel 5. Hasil Uji Signifikansi Parsial**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.434	0.121		3.572	0.000
BOARD INDEP	0.137	0.069	0.088	1.984	0.048
INST OWN	-0.060	0.022	-0.129	-2.740	0.006
GOV OWN	0.082	0.041	0.103	1.994	0.047
AUD COM	0.044	0.020	0.110	2.209	0.028
COMP SIZE	-0.012	0.004	-0.141	-2.972	0.003
PROFITABILITY	-0.236	0.089	-0.119	-2.640	0.009

a. Dependent Variable: TAX AVOIDANCE (ETR)

Berdasarkan dari hasil pengujian yang dilampirkan pada tabel 5, variabel dewan komisaris independen (BoardIndep) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,048 atau sebesar 4,8%, variabel struktur kepemilikan institusional (InstOwn) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,006 atau sebesar 0,6%, variabel struktur kepemilikan pemerintah (GovOwn) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,047 atau sebesar 4,7%, variabel jumlah komite audit (AudCom) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,028 atau sebesar 2,8%, variabel kontrol penelitian yang berupa variabel ukuran perusahaan (CompSize) dan profitabilitas perusahaan (Profitability) memiliki nilai signifikansi berturut-turut sebesar 0,3% dan sebesar 0,9%. Hal ini menandakan bahwa terdapat hubungan signifikansi secara parsial antara seluruh variabel independen dan kontrol dalam penelitian ini terhadap variabel dependen yaitu tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan karena nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 atau 5%.

**Tabel 6. Hasil Data Statistik Uji Beda t-test**

Group Statistics					
	YEAR	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
TAX_AVOIDANCE	2019	236	0.26663860	0.163493738	0.010642536
	2020	236	0.23682875	0.151555139	0.009865399

**Tabel 7. Hasil Uji Beda Dua Sampel**

Independent Samples Test					
	Sig. (2-tailed)	t-test for Equality of Means		95% Confidence Interval of the Difference	
		Mean Difference	Std. Error Difference	Lower	Upper



TAX_AVD	Equal variances assumed	0.041	0.029809847	0.014511708	0.001293990	0.058325704
	Equal variances not assumed	0.041	0.029809847	0.014511708	0.001293568	0.058326126

Hasil dari perhitungan nilai *mean* untuk *tax avoidance* tahun 2019 dari pengujian *independent sample t-test* menunjukkan nominal sebesar 26,6%, sementara nilai *mean* untuk *tax avoidance* tahun 2020 adalah sebesar 23,6%. Nilai Sig. (*2-tailed*) yang dihasilkan pada penelitian ini adalah sebesar 0,041 atau sebesar 4,1% yang kurang dari tingkat signifikansi 5%. Hal ini menandakan terdapat perbedaan yang signifikan antara perilaku penghindaran pajak perusahaan pada kondisi yang berbeda yaitu tahun 2019 dengan tahun 2020. Semakin kecil nilai rata-rata ETR perusahaan, maka dapat mencerminkan semakin besar adanya penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa selama pandemi Covid-19, perusahaan non-keuangan melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19 akibat adanya keinginan perusahaan untuk meningkatkan laba dengan mengurangi besarnya beban pajak selama kesulitan ekonomi tahun 2020.

### 1. Pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis pertama pada penelitian ini merumuskan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari dewan komisaris yang independen terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel independensi dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansi yang didapatkan untuk variabel ini adalah sebesar 0,048 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian, karena nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah sebesar 0,137, maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh independensi dewan komisaris yang positif signifikan terhadap *effective tax rate*, sehingga hipotesis pertama diterima.

Semakin banyak dewan komisaris independen pada perusahaan akan meningkatkan akurasi dan meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap dewan direksi (Singh, *et al.*, 2017). Dewan komisaris yang besar juga memberikan berbagai saran dan masukan kepada direksi sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan (Lefort & Urza, 2008). Komisaris independen akan memberikan penilaian yang objektif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan karena mereka tidak memiliki saham dalam perusahaan dan tidak memiliki kepentingan di dalamnya. Dengan demikian, komisaris independen dapat mengendalikan manajemen dan berlaku adil terhadap hak-hak pemegang saham. Dengan adanya peran komisaris independen dalam melakukan pengawasan terhadap penghindaran pajak oleh manajemen perusahaan, kepercayaan investor akan semakin besar bagi perusahaan. Semakin banyak komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat menyelesaikan dan mengatasi konflik agensi serta dapat memenuhi kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Van Der Pulos (2017) yang menunjukkan bahwa ketika ada lebih banyak komisaris independen di dewan, hal tersebut akan mengurangi tingkat penghindaran pajak. Selain itu, juga sejalan dengan penelitian Minnick dan Noga (2010) serta Aburajab, *et al.* (2019) yang melaporkan bahwa hubungan antara komisaris independen dan penghindaran pajak memiliki hubungan negatif. Lanis dan Richardson (2012)

menyatakan bahwa keberadaan direktur eksternal yang lebih independen berhubungan negatif dengan penghindaran pajak dan bahwa keberadaan dewan independen dengan atribut tata kelola perusahaan yang baik berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan adanya independensi dari dewan komisaris perusahaan, akan meningkatkan penerapan transparansi dalam segala informasi keuangan yang dimiliki perusahaan sehingga berpengaruh terhadap aktivitas penghindaran pajak yang menjadi semakin rendah.

## **2. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis kedua pada penelitian ini merumuskan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari struktur kepemilikan institusional terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansi yang didapatkan untuk variabel ini adalah sebesar 0,006 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian, karena nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah sebesar -0.060, maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur kepemilikan perusahaan oleh lembaga institusional yang negatif signifikan terhadap *effective tax rate*, sehingga hipotesis kedua ditolak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Bird dan Karolyi (2017) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional berhubungan positif dengan penghindaran pajak. Hal ini karena terdapat kemungkinan bahwa kepemilikan institusional berfokus pada pengembalian yang diharapkan atas investasinya, sehingga cenderung mengarahkan perusahaan ke tingkat penghindaran pajak yang tinggi untuk memaksimalkan laba yang diterima. Selain itu, juga terdapat kemungkinan bahwa investor institusional memiliki pengetahuan penghindaran pajak yang tinggi sehingga telah memahami batas risiko dari penghindaran pajak perusahaan dan dapat membuat manajemen perusahaan untuk merencanakan strategi pajak yang lebih aplikatif. Hal ini juga sesuai dengan penelitian oleh Kovermann dan Velte (2019) yang menyatakan bahwa investor institusional memiliki kekuatan potensial untuk meningkatkan penghindaran pajak perusahaan karena mereka dapat mendorong dan mengontrol *investee*-nya untuk melakukan penghindaran pajak sesuai dengan tingkat tertentu yang mereka inginkan dengan tujuan untuk membuat perusahaan lebih menguntungkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingginya struktur kepemilikan oleh lembaga institusional dan konsentrasi kepemilikan yang kuat pada perusahaan dapat menyediakan insentif yang lebih untuk penghindaran pajak dan semakin agresif karena kepemilikan institusional yang besar secara efektif dapat mengontrol manajer. Perusahaan akan menjadi sangat agresif dalam pengambilan keputusan yang memiliki implikasi kemungkinan terjadinya penghindaran pajak yang tinggi dengan bertujuan untuk mengurangi beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan. Lembaga institusional memiliki jumlah investasi saham yang besar dalam perusahaan sehingga cenderung memiliki motivasi untuk dapat melindungi nilai investasinya untuk keuntungan yang lebih tinggi (Desai & Dharmapala, 2006). Sehingga, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Almazan *et al.* (2005); Khurana dan Moser (2012) yang menyatakan kepemilikan institusional dengan jumlah saham yang besar memiliki pengaruh yang negatif terhadap penghindaran pajak.

## **3. Pengaruh Kepemilikan Perusahaan oleh Pemerintah terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis ketiga pada penelitian ini merumuskan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari struktur kepemilikan pemerintah terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel struktur kepemilikan pemerintah memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansi yang didapatkan untuk variabel ini adalah sebesar 0,047 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian, karena nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah sebesar 0,082, maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh struktur kepemilikan oleh pemerintah yang positif signifikan terhadap ETR, sehingga hipotesis ketiga diterima.

Perilaku penghindaran pajak sendiri memiliki beberapa konsekuensi utama yang harus dipertimbangkan perusahaan dengan kepemilikan oleh pemerintah (Crocker & Slemrod, 2005). Konsekuensi pertama terkait dengan penghindaran pajak yang mengurangi pengumpulan penerimaan pajak nasional. Selama perusahaan milik pemerintah lebih mungkin untuk mengejar tujuan sosial dan politik, daripada kebijakan memaksimalkan keuntungan, manajer perusahaan milik pemerintah mungkin lebih cenderung untuk menjauhkan diri dari penghindaran pajak karena tindakan tersebut menurunkan pengumpulan pendapatan pajak nasional dan mencegah distribusi sosial yang lebih luas dari pendapatan perusahaan. Konsekuensi kedua terkait dengan penghindaran pajak yang secara sosial tidak bertanggung jawab dan meningkatkan masalah reputasi. Ketika seorang manajer terhubung secara politik, penghindaran pajak berpotensi menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi reputasi politik pemerintah yang menunjuk manajer yang agresif pajak (Chang & Wong, 2004). Oleh karena itu, perusahaan dengan kepemilikan pemerintah cenderung menjauhkan diri dari penghindaran pajak untuk menjaga reputasi politik mereka.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan kepemilikan oleh pemerintah cenderung dianggap tidak mendukung praktik penghindaran pajak karena pemerintah sebagai pemegang saham lebih memperhatikan tujuan sosial dan politik daripada sekedar keuntungan perusahaan. Perusahaan dengan kepemilikan pemerintah akan membayar pajak lebih banyak sesuai dengan kewajiban mereka dibandingkan dengan perusahaan tanpa kepemilikan pemerintah. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Zhang *et al.* (2012) yang menggambarkan bahwa kepemilikan pemerintah berpengaruh negatif terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Potensi penurunan nilai saham juga tidak begitu mempengaruhi pemerintah karena saham milik pemerintah tidak dapat diperjualbelikan secara bebas di pasar saham. Berdasarkan penelitian dari Jiang *et al.* (2010), perusahaan dengan kepemilikan pemerintah tidak akan berfokus pada penurunan harga sahamnya karena keuntungan yang dihasilkan tidak berasal dari kenaikan nilai saham perusahaan. Sehingga, kepemilikan saham yang besar oleh pemerintah dalam suatu perusahaan, akan membawa pengaruhnya yang kuat dalam kebijakan perpajakan untuk meminimalisir praktik penghindaran pajak dengan tujuan meningkatkan penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat.

#### **4. Pengaruh Ukuran Komite Audit Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Hipotesis keempat pada penelitian ini merumuskan bahwa terdapat pengaruh yang negatif dari ukuran komite audit terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari pengujian hipotesis yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel jumlah anggota komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansi yang didapatkan untuk variabel ini adalah sebesar 0,028 atau lebih

kecil dari 0,05. Kemudian, karena nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah sebesar 0,044, maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh ukuran komite audit perusahaan yang positif signifikan terhadap ETR, sehingga hipotesis keempat diterima.

Keefektifan dari fungsi pengawasan komite audit sendiri bergantung pada jumlah komite audit yang dimiliki pada perusahaan (Vinten & Lee, 1993). Teori keagenan menunjukkan bahwa ketika jumlah komite audit di perusahaan meningkat, aktivitas perusahaan akan lebih terkontrol sehingga memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Ketepatan jumlah dari anggota komite audit pada perusahaan dibutuhkan agar pengalaman, pengetahuan serta keahlian mereka mampu digunakan untuk kepentingan dari pemegang saham (Dalton, *et al.*, 1999). Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Zemzem & Ftouhi (2013) yang menyatakan bahwa komite audit dan penghindaran pajak memiliki hubungan yang negatif. Jika komite audit meningkat, maka penghindaran pajak yang diprosikan dengan *effective tax rate* akan berkurang. Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka pengendalian kebijakan keuangan akan semakin ketat sehingga akan mengurangi kecenderungan manajemen untuk melakukan perilaku penghindaran pajak. Hasil dari penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Deslandes *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perusahaan membentuk komite audit dengan perannya untuk memberikan dukungan kepada dewan komisaris dalam mengawasi penyusunan laporan keuangan perusahaan dan memberikan gambaran tentang tindakan yang harus dilakukan perusahaan terkait dengan praktik penghindaran pajak perusahaan. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa dengan semakin banyaknya anggota komite audit dalam suatu perusahaan, pelaksanaan pengawasan terhadap keuangan perusahaan dapat lebih ketat sehingga membuat manajemen lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan, termasuk dalam hal meminimalisir praktik *tax avoidance*. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian oleh Richardson *et al.* (2013) yang menyatakan bahwa ukuran dari komite audit perusahaan memiliki pengaruh pada kebijakan perusahaan yang menjadi cenderung lebih tidak agresif untuk melakukan penghindaran pajak.

##### **5. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Dalam penelitian ini terdapat perhitungan variabel karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol penelitian berupa faktor lain-lain yang juga dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Salah satu proksi dari karakteristik perusahaan adalah ukuran perusahaan, di mana pada penelitian ini merumuskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari ukuran perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansi yang didapatkan untuk variabel ini adalah sebesar 0,003 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian, karena nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah sebesar -0,012, maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh ukuran perusahaan yang negatif signifikan terhadap ETR dan positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Laba yang besar dan stabil akan cenderung mendorong perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Chytis *et al.*, 2019). Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin kompleks pula transaksi yang terkait didalamnya, sehingga perusahaan akan memiliki sumber daya yang besar untuk dapat digunakan dalam tujuan penghematan biaya



pajak sebagai kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan. Selain itu, perusahaan besar cenderung memiliki koneksi politik yang lebih kuat sehingga akan mempengaruhi tingkat *effective tax rate* yang rendah karena adanya dorongan untuk praktik penghindaran pajak yang tinggi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Yahaya dan Yusuf (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki hubungan positif dan signifikan dengan aktivitas penghindaran pajak. Hal tersebut dikarenakan perusahaan dengan perputaran yang lebih tinggi memiliki peluang untuk memilih dan memanipulasi prosedur akuntansi untuk mengurangi kewajiban pajak yang dibayarkan kepada pihak berwenang.

#### **6. Pengaruh Profitabilitas Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak**

Penelitian ini menggunakan perhitungan variabel karakteristik perusahaan sebagai variabel kontrol penelitian berupa faktor lain-lain yang juga dapat memengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Salah satu proksi dari karakteristik perusahaan adalah profitabilitas perusahaan, di mana pada penelitian ini merumuskan bahwa terdapat pengaruh yang positif dari profitabilitas perusahaan terhadap perilaku penghindaran pajak perusahaan. Hasil dari pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance* karena nilai signifikansi yang didapatkan untuk variabel ini adalah sebesar 0,009 atau lebih kecil dari 0,05. Kemudian, karena nilai koefisien beta yang dihasilkan adalah sebesar -0,236, maka hal ini menunjukkan adanya pengaruh profitabilitas perusahaan yang negatif signifikan terhadap ETR dan positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Profitabilitas menjadi indikator bagi perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun tingkat keuntungan yang tinggi juga dapat menyebabkan beban pajak penghasilan yang besar. Dengan adanya biaya pajak yang besar, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi akan cenderung juga meningkatkan praktik penghindaran pajak mereka. Berdasarkan dari teori agensi, perusahaan yang menerima *return* dalam jumlah besar akan cenderung mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan karena agen selaku pengelola perusahaan memiliki kompensasi yang didasarkan pada laba perusahaan. Semakin besar laba perusahaan, maka semakin besar pula bonus yang akan diterima oleh pihak agen perusahaan. Oleh karena itu, agen akan berupaya untuk mengelola beban pajak perusahaan sedemikian rupa agar dapat berkurang dengan melakukan penghindaran pajak yang lebih tinggi. Tindakan ini akan mengoptimalkan laba yang diterima perusahaan sehingga tidak akan mengurangi kompensasi yang akan diterima oleh agen tersebut. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rego dan Wilson (2012), McGuire *et al.* (2012), serta Gaertner (2013), di mana ketiga penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari profitabilitas perusahaan terhadap aktivitas penghindaran pajak.

#### **SIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk uji hipotesis dengan menggunakan uji analisis regresi, maka kesimpulan yang dapat ditarik dari pembahasan adalah independensi dari dewan komisaris perusahaan (BoardIndep) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (Tax Avoidance) sehingga menghasilkan keputusan hipotesis pertama (H1) diterima. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya proporsi dewan komisaris yang independen dalam perusahaan akan menurunkan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan dalam manajemen perusahaan.



Sementara itu, struktur kepemilikan institusional (InstOwn) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (Tax Avoidance) sehingga menghasilkan keputusan hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya kepemilikan suatu perusahaan oleh lembaga institusional akan meningkatkan pula aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan dalam manajemen perusahaan. Struktur kepemilikan pemerintah (GovOwn) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (Tax Avoidance) sehingga menghasilkan keputusan hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya kepemilikan suatu perusahaan oleh pemerintah akan menurunkan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan dalam manajemen perusahaan. Ukuran komite audit perusahaan (AudCom) memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak (Tax Avoidance) sehingga menghasilkan keputusan hipotesis keempat (H4) diterima. Sehingga, hal ini menandakan bahwa semakin besarnya jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan akan menurunkan aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan dalam manajemen perusahaan.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi bagi perkembangan keilmuan sebagai tambahan informasi untuk memperluas wawasan terutama terkait dengan teori agensi pada tata kelola perusahaan dan bagi pemegang saham perusahaan yang terutama berkaitan dengan proporsi dewan komisaris independen, struktur kepemilikan perusahaan oleh pemerintah dan ukuran komite audit perusahaan sebagai atribut *corporate governance* yang pada penelitian ini telah terbukti dapat menurunkan praktik penghindaran pajak perusahaan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk dapat memperhatikan tingkat kepatuhan kewajiban perpajakan terutama terkait dengan perusahaan publik Indonesia yang dimiliki oleh lembaga institusional karena semakin tinggi kepemilikannya, semakin besar pula potensi terjadinya penghindaran pajak. Sehingga, dalam hubungannya dengan pengawasan pajak, Direktorat Jenderal Pajak sebagai regulator diharapkan dapat menyarankan pembatasan kepemilikan institusional dalam perusahaan agar tidak terlalu tinggi karena telah terbukti mendukung praktik *tax avoidance*.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sehingga perlu dikembangkan untuk penelitian selanjutnya. Beberapa keterbatasan tersebut antara lain adalah nilai *adjusted R<sup>2</sup>* pada penelitian ini menggambarkan kemampuan variabel independen yang masih tergolong rendah dalam menjelaskan variabel dependen berupa *tax avoidance* dan penelitian ini memiliki rentang waktu periode penelitian cukup singkat dengan jumlah tahun sebagai sampel hanya selama dua tahun pada periode sebelum dan selama setahun pertama pandemi Covid-19. Sehingga, penelitian selanjutnya diharapkan untuk dapat menambahkan penggunaan variabel independen dan kontrol lain yang belum digunakan di penelitian ini sebagai proksi dari *corporate governance*. Dengan penambahan proksi tata kelola perusahaan, hasil penelitian selanjutnya diharapkan akan lebih merepresentasikan pengaruh tata kelola perusahaan yang lebih signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian selanjutnya juga diharapkan untuk dapat memperluas rentang waktu periode yang akan diteliti dengan menggunakan jumlah tahun sebagai sampel yang lebih lama agar jangkauan data dapat lebih banyak dan memungkinkan terdapat temuan baru terkait dengan aktivitas *tax avoidance* pada periode setelah pandemi Covid-19.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aburajab, L., et al., (2019). Board of Director's Characteristics and Tax Aggressiveness: Evidence from Jordanian Listed Firms. *Theoretical Economics Letters*, 9 (7), 2732–2745.
- Almazan, A., et al., (2005). Active Institutional Shareholders and Costs of Monitoring: Evidence From Executive Compensation. *Financial management*, 34 (4), 5-34.
- Bird, A., & S. Karolyi. (2017). Governance and Taxes: Evidence from Regression Discontinuity. *The Accounting Review*, 92 (1), 29-50.
- Chang, E. C., & Wong, S. M. (2004). Political Control and Performance in China's Listed Firms. *Journal of Comparative Economics*, 32 (4), 617-636.
- Chytis, E., et al., (2019). The Relationship Between Tax Avoidance, Company Characteristics and Corporate Governance: Evidence from Greece. *Corporate Ownership and Control*, 16 (4), 77–86.
- Crocker, K., & Slemrod, J. (2005). Corporate Tax Evasion with Agency Cost. *Journal of Public Economics*, 89 (9-10), 1593–1610.
- Dalton, D. R., et al., (1999). Number Of Directors and Financial Performance: A Meta-Analysis. *Academy of Management Journal*, 42 (6), 674-686.
- Desai, M. A., & Dharmapala, D. (2006). Corporate Tax Avoidance and High-Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, 79 (1), 145-179.
- Deslandes, M., Fortin, A., & Landry, S. (2019). Audit Committee Characteristics and Tax Aggressiveness. *Managerial Auditing Journal*, 35 (2), 272–293.
- Gaertner, F. B. (2013). CEO After-Tax Compensation Incentives and Corporate Tax Avoidance. *Contemporary Accounting Research*, 31 (4), 1077-1102.
- Ghozali, Imam. (2018). Aplikasi Analisis *Multivariate* dengan Program IBM SPSS 25. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A Review of Tax Research. *Journal of Accounting and Economics*, 50, 127–178.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.
- Jiang, G., Lee, C. M., & Yue, H. (2010). Tunneling Through Intercorporate Loans: The China Experience. *Journal of Financial Economics*, 98 (1), 1-20.
- Khurana, I., & Moser, W. (2012). Institutional Shareholder's Investment Horizon and Tax Avoidance. *The Journal of the American Taxation Association*, 35 (1), 111–134.
- Kovermann, J., & Velte, P. (2019). The Impact of Corporate Governance on Corporate Tax Avoidance—A Literature Review. *Journal of International Accounting, Auditing and Taxation*, 36, 100270.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 31, 86-108.
- Lefort F, Urza F (2008). Board Independence, Firm Performance and Ownership Concentration: Evidence from Chile. *Journal of Business Research*, 61 (6), 615–622.
- McGuire, S. T., Omer, T. C., & Wang, D. (2012). Tax Avoidance: Does Tax-Specific Industry Expertise Make a Difference? *The Accounting Review*, 87 (3), 975–1003.
- Minnick, K., & Noga, T. (2010). Do Corporate Governance Characteristics Influence Tax Management? *Journal of Corporate Finance*, 16, 703–718.
- Ogbeide, S.O. & Obaretin, O. (2018). Corporate Governance Mechanisms and Tax Aggressiveness of Listed Firms in Nigeria. *Amity Journal of Corporate Governance*, 3

(1), 1–12.

- Omesi, I., & Appah, E. (2021). Corporate Governance and Tax Avoidance of Listed Consumer and Industrial Goods Companies in Nigeria. *Journal of Economics and Finance*, 12 (2), 17–31.
- Rego, S. O., & Wilson, R. (2012). Equity Risk Incentives and Corporate Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting Research*, 50 (3), 775-810.
- Richardson, G., Taylor, G., & Lanis, R. (2013). The Impact of Board of Director Oversight Characteristics on Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*, 32 (3), 68-88.
- Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1997). A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52, 737–783.
- Singh, S., et al., (2017). Corporate Governance and Tobin's Q as a Measure of Organizational Performance. *British Journal of Management*, 29, 171-190.
- Tax Justice Network. (2020). The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of COVID-19. London, United Kingdom: Tax Justice Network.
- Van Der Pilos, N. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance: Does The Board of Directors Influence Tax Avoidance? Unpublished Master Thesis. The Erasmus School of Economics, United Kingdom.
- Vinten, G., & Lee, C. (1993). Audit Committees and Corporate Control. *Managerial Auditing Journal*, 8 (3), 11-24.
- Wang, X., Manry, D., & Wandler, S. (2011). The Impact of Government Ownership on Dividend Policy in China. *Advances in Accounting*, 27 (2), 366–372.
- Wulandari, P., & Sudarma, M. (2022). The Influence of Ownership Structure, Leverage, Profitability, Company Size, and Audit Quality on Tax Avoidance in Indonesia. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 206, 228-234.
- Yahaya, K. A., & Yusuf, K. (2020). Impact of Company Characteristics on Aggressive Tax Avoidance in Nigerian Listed Insurance Companies. *Journal of Business Administration*, 9 (2), 101-111.
- Zemzem, A., & Ftouhi, K. (2013). The Effects of Board of Director's Characteristics on Tax Aggressiveness. *Research Journal of Finance and Accounting*, 4(4), 140–147.
- Zeng, T. (2011). Ownership Concentration, State Ownership and Effective Tax Rates: Evidence from China's Listed Firms. *Accounting Perspective*, 9 (4), 271–289.
- Zhang, H., Li, W., & Jian, M. (2012). How Does State Ownership Affect Tax Avoidance? Evidence From China. *Singapore Management University, School of Accountancy*, 13-18.